

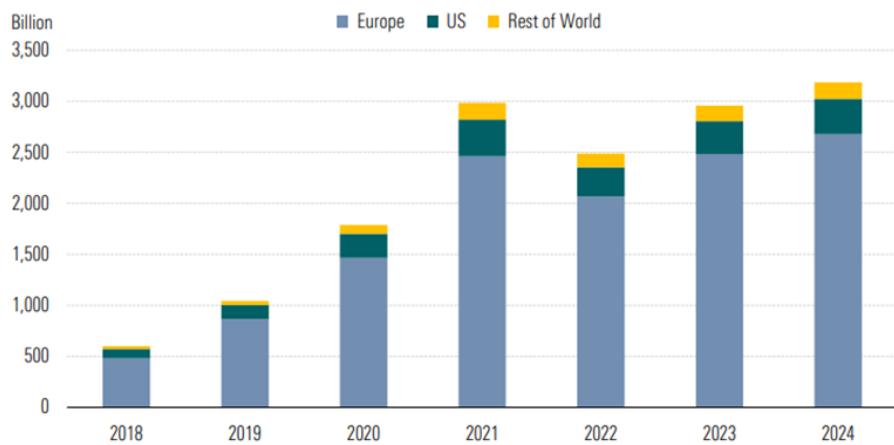
BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Pada tahun 2015, Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) menetapkan *Sustainable Development Goals* atau yang biasa dikenal SDGs yang memuat 17 tujuan SDGs mencakup berbagai aspek pembangunan, seperti ekonomi, lingkungan, sosial, dan institusional. Tujuan utamanya yaitu menghapus kemiskinan, menjaga kelestarian bumi, serta menjamin keamanan dan kesejahteraan bagi seluruh masyarakat (Sudipa, 2023: 1-3). Untuk dapat mencapai tujuan SDGs, pemerintah dengan sektor swasta termasuk perusahaan bersama-sama bertanggungjawab dalam menerapkan prinsip keberlanjutan ke dalam strategi bisnis mereka.

Sejalan dengan agenda global tersebut, keberlanjutan kini menjadi perhatian utama di berbagai sektor usaha, tidak hanya dalam skala lokal tetapi juga global. Perhatian tersebut meningkatkan tekanan dari pemangku kepentingan terhadap peran aktif perusahaan dalam praktik bisnis yang berkelanjutan dan transparan. Oleh karena itu, tuntutan perusahaan bukan hanya mengejar keuntungan, tetapi juga menunjukkan komitmen nyata dalam menjaga lingkungan serta memberikan kontribusi sosial bagi masyarakat sekitar (Madona & Khafid, 2020).



Gambar 1.1 Pola Distribusi Aset Dana ESG tahun 2018-2024

Sumber: morningstar.com

Meningkatnya kesadaran global terhadap isu lingkungan dan sosial yang dibuktikan dalam gambar 1.1 yang menunjukkan jumlah aset dana berkelanjutan global yang mencatat rekor tertinggi pada akhir tahun 2024 yaitu sebesar USD 3,2 triliun. Angka ini meningkat 8% dibandingkan tahun sebelumnya dan lebih besar empat kali lipat dibandingkan tahun 2018. Secara global, pangsa pasar dana berkelanjutan juga meningkat signifikan menjadi 2,3% di tahun 2024 dibandingkan tahun 2018 yang hanya 0,7% (Pucci, 2025). Fenomena ini menunjukkan bahwa praktik keberlanjutan kini juga bagian penting dari strategi bisnis jangka Panjang dan tidak lagi bersifat *opsional*.

Keberlanjutan sendiri merupakan kemampuan perusahaan untuk memenuhi kebutuhan saat ini dengan mempertimbangkan dampak bisnisnya terhadap lingkungan, masyarakat, dan ekonomi, sehingga tidak mengurangi peluang generasi mendatang dalam memenuhi kebutuhan mereka (Delfy & Bimo, 2021). Hal tersebut meliputi cara mengelola sumber daya alam secara bertanggung jawab, pemberdayaan masyarakat sekitar, serta tata kelola yang

diterapkan dengan baik. Bentuk penerapan prinsip keberlanjutan tersebut, disusun laporan keberlanjutan (*sustainability report*) oleh perusahaan yang berpedoman pada pengukuran standar *Global Reporting Initiative* atau disingkat GRI.

Standar GRI ini berguna sebagai panduan bagi organisasi untuk mengungkapkan secara terbuka dampak paling signifikan dari kegiatan operasionalnya terhadap aspek ekonomi, lingkungan, dan sosial. Diterapkannya standar ini dinilai mampu meningkatkan transparansi dan akuntabilitas organisasi terhadap pemangku kepentingan (GRI 1: Landasan 2021). Penelitian ini menggunakan GRI Standards 2021 sebagai acuan dalam menilai tingkat pengungkapan *sustainability report*. Versi terbaru dari GRI ini menawarkan pendekatan berbasis dampak yang lebih relevan untuk mengevaluasi komitmen keberlanjutan perusahaan secara menyeluruh. Secara khusus, penelitian ini berfokus pada GRI 2 (*General Disclosure*) yang mencakup informasi umum seperti profil organisasi, tata kelola, dan strategi keberlanjutan, serta GRI 3 (*Material Topics*) yang memuat pengungkapan terkait topik-topik material yang dianggap penting oleh perusahaan. Selain itu, digunakan pula beberapa indikator lain untuk melengkapi analisis yaitu GRI 200 yang mewakili aspek ekonomi, GRI 300 mewakili aspek lingkungan, dan GRI 400 mewakili aspek sosial.

Di Indonesia, penerapan pelaporan keberlanjutan telah didorong melalui regulasi POJK No. 51/POJK.03/2017 dimana lembaga jasa keuangan, emiten, dan perusahaan publik diwajibkan untuk mempublikasikan *sustainability report* sebagai bentuk transparansi dalam aspek ESG (lingkungan, sosial, dan tata kelola). Namun, setelah regulasi tersebut diterapkan, praktik di lapangan

memperlihatkan bahwa beberapa perusahaan belum konsisten dalam menerbitkan *sustainability report*. Diantaranya yaitu PT Borneo Olah Sarana Tbk. yang hanya mempublikasikan laporan tahunan dan laporan keberlanjutan tahun 2021 hingga 2022, PT Black Diamond Resource Tbk. yang hanya menerbitkan laporan tahunan dan laporan keberlanjutan tahun 2022-2023. Selain itu, PT Adaro Andalan Indonesia Tbk. dan PT Trada Alam Minera tidak mempublikasikan laporan tahunan dan laporan keberlanjutan sama sekali dari 2021 hingga 2023. Hal ini dikarenakan beberapa perusahaan masih menganggap laporan keberlanjutan ini bersifat sukarela (Indriastuti, dkk. 2021). Selain itu, masih terdapat perusahaan yang belum memiliki website resmi perusahaan seperti PT Trada Alam Minera Tbk. dan PT Borneo Olah Sarana Tbk, sehingga akses terhadap informasi keberlanjutan menjadi lebih terbatas. Padahal, menurut survei GlobeScan dan *Global Reporting Initiative* (GRI), Indonesia menempati peringkat tertinggi dalam transparansi laporan keberlanjutan.

Di sisi lain, meskipun kesadaran akan pentingnya praktik keberlanjutan semakin meningkat, berbagai kasus pencemaran lingkungan akibat aktivitas pertambangan masih terus terjadi. Menurut Greenpeace, aktivitas pertambangan di Indonesia menyebabkan sekitar 70% kerusakan lingkungan (Bahruddin, dkk. 2022). Sebagai salah satu sektor dengan risiko yang tinggi serta dampak lingkungan yang signifikan, industri pertambangan sering menjadi sorotan terkait tata kelola keberlanjutan. Sumber daya alam tidak terbarukan misalnya batu bara, minyak, gas, dan logam yang dieksplorasi dan diekstraksi dalam industri ini berpotensi menyebabkan berbagai kerusakan lingkungan (Wilasittha, dkk. 2022).

Dampak lingkungan ini semakin nyata dengan adanya berbagai kasus pencemaran yang menunjukkan lemahnya pengawasan serta pengelolaan lingkungan oleh perusahaan pertambangan. Salah satu kasus terkait dampak perusahaan pertambangan terhadap lingkungan adalah penambangan nikel ilegal di Sulawesi Tenggara pada 13 November 2023 yang ditangani oleh Direktorat Penegakan Hukum (Gakkum) Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) Wilayah Sulawesi. Aktivitas pertambangan tanpa izin tersebut menyebabkan kerusakan hutan dan mengancam ekosistem sekitarnya. Selain itu, laporan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) mengungkap adanya permasalahan dalam pengelolaan jaminan reklamasi dan pascatambang pada 22 Februari 2024, yang menunjukkan bahwa banyak perusahaan pertambangan mineral dan batu bara belum sepenuhnya menjalankan kewajiban mereka dalam pemulihian lingkungan pascatambang. Kasus pencemaran lainnya terjadi di Perairan Pulau Labengki, Sulawesi Tenggara pada 9 Juli 2023, dimana limbah tambang nikel mencemari ekosistem laut dan mengancam sumber daya perikanan. Selain itu, PT Medco E&P Malaka juga pernah menghadapi kasus pencemaran limbah yang berdampak pada kesehatan masyarakat sekitar pada 11 Januari 2023.

Berbagai kasus tersebut menunjukkan bahwa industri pertambangan memiliki risiko lingkungan yang tinggi sehingga transparansi dalam *sustainability report* menjadi semakin penting. Laporan keberlanjutan yang akurat menunjukkan bagaimana perusahaan patuh terhadap regulasi lingkungan, juga sebagai alat pemangku kepentingan seperti pemerintah, masyarakat dan investor untuk menilai komitmen perusahaan dalam mengelola dampak lingkungan (Jati, dkk. 2023).

Masyarakat dan pemerintah memerlukan laporan yang transparan untuk memastikan perusahaan bertanggung jawab atas aktivitas operasionalnya, sedangkan investor mempertimbangkan aspek keberlanjutan dalam pengambilan keputusan investasi.

Beberapa penelitian membahas mengenai faktor – faktor yang memengaruhi *sustainability report*. Salah satunya kepemilikan institusional (Susadi & Kholmi, 2021). Kepemilikan institusional didefinisikan saham perusahaan yang dikuasai pihak luar perusahaan seperti institusi pemerintah, keuangan, hukum, swasta, maupun lembaga lainnya (Pratomo & Rana, 2021). Variabel ini juga merupakan bagian dari GCG (*Good Corporate Governance*) dan telah terbukti secara dominan berpengaruh terhadap pengungkapan *sustainability report*.

Aldin (2020) mengungkapkan bahwa berdasarkan data per Oktober 2020, komposisi kepemilikan saham pada Bursa Efek Indonesia terdiri atas 12,2% saham investor ritel, 39% saham institusi domestik, dan 48% saham institusi asing (katadata.co.id). Data ini menunjukkan bahwa kepemilikan institusional baik domestik maupun asing memiliki proporsi saham yang cukup besar di Indonesia. Penelitian oleh Delfy & Bimo (2021) juga menyebutkan bahwa kepemilikan institusional terbukti secara empiris berpengaruh positif pada *sustainability report*, dimana perusahaan yang mempunyai kepemilikan institusional tinggi lebih memiliki insentif untuk menghasilkan *sustainability report* yang berkualitas. Selain itu, penelitian oleh Gold, dkk. (2022) dan Alessa, dkk. (2024) menyebutkan bahwa tekanan dari investor meningkatkan kinerja pengungkapan keberlanjutan

perusahaan. Meskipun GCG berperan dalam mengatur bagaimana perusahaan dikelola secara keseluruhan, pengaruhnya terhadap *sustainability report* bisa bervariasi tergantung kebijakan internal perusahaan.

Perusahaan yang mempunyai kepemilikan institusional tinggi lebih baik dalam hal transparansi. Kepemilikan institusional dapat meningkatkan efektivitas pengawasan terhadap perusahaan. Hal ini disebabkan investor institusional punya kapasitas lebih besar dalam melakukan kontrol daripada investor retail (Maulana, 2020). Investor institusi seringkali menuntut standar pelaporan yang tinggi, termasuk dalam aspek keberlanjutan. Hal ini disebabkan oleh fakta bahwa investor institusional memiliki kepentingan jangka panjang terhadap perusahaan dan ingin memastikan bahwa perusahaan beroperasi secara berkelanjutan (Delfy & Bimo, 2021). Akibat meningkatnya kesadaran global terhadap investasi berbasis ESG, investor institusional lebih memilih memberikan investasi pada perusahaan yang melakukan pengungkapan *sustainability report* lebih baik. Oleh karena itu, perusahaan dengan kepemilikan institusional besar mungkin lebih terdorong untuk meningkatkan transparansi dalam pelaporan keberlanjutan guna menarik minat investor dan menjaga reputasi mereka di pasar.

Selain kepemilikan institusional, kinerja lingkungan juga diduga berperan dalam mendorong pengungkapan *sustainability report* (Simoni, dkk. 2020). Perusahaan pertambangan yang memiliki kinerja lingkungan bagus sering kali lebih baik dalam transparansi pengungkapan informasi keberlanjutan dengan tujuan memperlihatkan komitmen dalam mematuhi regulasi dan tanggung jawab sosial mereka. Kinerja lingkungan merupakan evaluasi perusahaan dalam

mengelola dan menjaga lingkungan, baik di dalam maupun di luar area operasionalnya (Ramadhani, dkk. 2022). Peningkatan kinerja lingkungan akan berdampak pada peningkatan laporan keberlanjutan karena para investor mulai melihat dari segi tanggung jawab sosial pada lingkungan sekitar (Indriastuti, dkk. 2021). Sebagai contoh, perusahaan yang mendapatkan PROPER rating tinggi (Emas atau Hijau) cenderung lebih aktif dalam menyusun *sustainability report*. Namun, perusahaan yang memiliki risiko lingkungan buruk mungkin tidak mempublikasikan terkait dampak negatif operasional mereka.

Penelitian oleh Simoni, dkk. (2020) dan Jati, dkk. (2023) mengemukakan adanya pengaruh positif dari kinerja lingkungan terhadap peningkatan laporan keberlanjutan. Hal ini berarti kinerja lingkungan yang bagus memengaruhi perusahaan untuk lebih terbuka dalam pengungkapan informasi keberlanjutan mereka sebagai bagian tanggung jawab untuk ditunjukkan pada pemangku kepentingan. Disamping itu, terdapat pendapat lain yang menyebutkan hal yang bertolak belakang. Penelitian oleh Indriastuti, dkk. (2021) mengemukakan bahwa pengungkapan laporan keberlanjutan perusahaan tidak dipengaruhi oleh faktor kinerja lingkungan. Perbedaan hasil ini menarik untuk diteliti lebih lanjut karena dari segi perbedaan periode penelitian yang mungkin berpengaruh pada hasil. Selain itu, seiring berjalannya waktu, dinamika dalam perusahaan juga mungkin dapat memengaruhi keputusan mereka dalam mengungkapkan laporan keberlanjutan.

Selain faktor kepemilikan institusional dan kinerja lingkungan, faktor lain yang diduga berperan dalam pengungkapan *sustainability report* adalah *intellectual*

capital. *Intellectual capital* mencakup aset intelektual seperti pengetahuan karyawan, inovasi teknologi, dan sistem manajemen yang efisien. *Intellectual capital* didefinisikan aset yang dimiliki perusahaan yang perlu dikembangkan untuk meningkatkan keuntungan jangka panjang (Destania & Puspitasari, 2021). Perusahaan dengan *intellectual capital* yang tinggi punya sumber daya manusia lebih terampil dalam mengelola informasi keberlanjutan, sistem lebih terorganisir mendokumentasikan dampak sosial lingkungan, serta budaya organisasi lebih terbuka terhadap praktik pelaporan yang transparan (Selfiani & Usmar, 2023). Dengan demikian, *intellectual capital* perusahaan yang semakin tinggi memungkinkan perusahaan mewujudkan *sustainability report* yang lebih lengkap dan terstruktur juga lebih besar.

Namun, penelitian yang secara spesifik meneliti pengaruh *intellectual capital* terhadap pengungkapan *sustainability report* masih sangat terbatas. Beberapa penelitian sebelumnya lebih banyak mengaitkan *intellectual capital* dengan keberlanjutan bisnis maupun kinerja keuangan perusahaan. Penelitian oleh Gharib, dkk. (2023) mengemukakan bahwa beberapa elemen dari modal intelektual menunjukkan hasil berbeda, seperti *Green Structural Capital* memperlihatkan hasil positif signifikan pengaruhnya terhadap *environmental sustainability*, sedangkan *Green Human Capital* dan *Green Relational Capital* tidak memperlihatkan pengaruh signifikan. Temuan ini menegaskan bahwa bagian tertentu dari *intellectual capital* berperan penting dalam mendukung keberlanjutan lingkungan perusahaan. Penelitian serupa oleh Idris, dkk. (2023) pada UMKM

Batik yang tersebar di enam kota di Indonesia menemukan bahwa *intellectual capital* terbukti memengaruhi keberlanjutan bisnis.

Selain itu, Gani (2022) dan Destania & Puspitasari (2021) menemukan bahwa komponen *intellectual capital* terbagi atas *Human Capital Efficiency* yang disingkat HCE, *Structural Capital Efficiency* disingkat SCE, dan *Capital Employed Efficiency* disingkat CEE terbukti memengaruhi kinerja keuangan perusahaan dalam arah positif. Hal ini memperlihatkan bahwa perusahaan yang mempunyai SDM, sistem organisasi, dan pengelolaan modal yang baik lebih inovatif dan efisien dalam mengelola keuangan mereka. Dalam konteks keterbukaan informasi, perusahaan yang punya pengelolaan keuangan baik sering dikaitkan dengan peningkatan transparansi termasuk dalam pengungkapan *sustainability report*. Berdasarkan temuan ini, penelitian ini ingin meneliti apakah *intellectual capital* memengaruhi pengungkapan *sustainability report* yang hingga saat ini belum banyak diteliti secara langsung.

Meskipun kepemilikan institusional, kinerja lingkungan, dan *Intellectual Capital* merupakan faktor yang berbeda, ketiganya memiliki hubungan yang saling mendukung dalam mendorong transparansi *sustainability report*. Kepemilikan institusional menciptakan tekanan eksternal dari investor agar perusahaan lebih transparan dalam pelaporan ESG. Kinerja lingkungan menjadi faktor reputasi, dimana perusahaan yang memiliki tanggung jawab lingkungan baik lebih terbuka dalam *sustainability report* untuk menjaga citra positif di mata publik. Sementara itu, *intellectual capital* berperan sebagai kapabilitas internal, dimana perusahaan dengan SDM dan sistem manajemen yang baik lebih mampu

menyusun laporan keberlanjutan secara detail dan sistematis. Ketiga faktor ini membentuk kesatuan yang saling berhubungan dalam mendorong transparansi *sustainability report*. Investor institusional membutuhkan perusahaan yang bertanggung jawab terhadap lingkungan, sementara kinerja lingkungan yang baik tidak akan efektif tanpa adanya sistem manajemen dan sumber daya intelektual yang mendukung transparansi laporan keberlanjutan.

Penelitian terdahulu sudah banyak yang menghubungkan kepemilikan institusional dengan pengungkapan *sustainability report* (Alessa, dkk. 2024; Delfy & Bimo, 2021; Gold, dkk. 2022; Susadi & Kholmi, 2021). Selain itu juga banyak penelitian yang menghubungkan kinerja lingkungan dengan pengungkapan *sustainability report* (Indriastuti, dkk. 2021; Simoni, dkk. 2020). Namun, penelitian yang membahas pengaruh *intellectual capital* umumnya masih berfokus seputar kinerja keuangan atau nilai perusahaan (Destania & Puspitasari, 2021; Gani, 2022). Meskipun beberapa penelitian ada yang menghubungkannya dengan keberlanjutan bisnis, penelitian yang fokus menguji pengaruh *intellectual capital* terhadap pengungkapan *sustainability report* masih terbatas, terutama di sektor pertambangan. Selain itu, penelitian ini juga menggabungkan variabel-variabel yang belum banyak diuji secara bersamaan yaitu kepemilikan institusional, kinerja lingkungan, dan *intellectual capital*, untuk diuji pengaruhnya pada pengungkapan *sustainability report*. Berangkat dari latar belakang tersebut kemudian diambil judul Pengaruh Kepemilikan Institusional, Kinerja Lingkungan, dan *Intellectual Capital* terhadap Pengungkapan *Sustainability Report* pada Perusahaan Pertambangan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia Periode 2021-2024.

1.2. Perumusan Masalah

1. Apakah kepemilikan institusional berpengaruh terhadap pengungkapan *sustainability report*?
2. Apakah kinerja lingkungan berpengaruh terhadap pengungkapan *sustainability report*?
3. Apakah *intellectual capital* berpengaruh terhadap pengungkapan *sustainability report*?

1.3. Tujuan Penelitian

1. Menguji pengaruh kepemilikan institusional terhadap pengungkapan *sustainability report*.
2. Menguji pengaruh kinerja lingkungan terhadap pengungkapan *sustainability report*.
3. Menguji pengaruh *intellectual capital* terhadap pengungkapan *sustainability report*.

1.4. Manfaat Penelitian

1.4.1 Manfaat Praktis

1. Bagi Investor: Untuk membantu investor memahami perusahaan mana yang lebih transparan dalam pelaporan keberlanjutan, sehingga mereka bisa mengambil keputusan investasi yang lebih baik, terutama bagi mereka yang peduli dengan prinsip ESG.

2. Bagi Regulator (OJK & KLHK): Hasil penelitian ini bisa memberikan masukan apakah kebijakan yang ada saat ini sudah efektif untuk memotivasi perusahaan agar lebih terbuka dalam *sustainability report* atau apakah perlu kebijakan tambahan untuk mendorong peningkatan kepatuhan perusahaan.
3. Bagi Perusahaan: Hasil penelitian ini bisa memperlihatkan gambaran faktor yang meningkatkan transparansi *sustainability report*, sehingga perusahaan bisa lebih memahami bagaimana cara meningkatkan kredibilitas laporan keberlanjutan mereka di mata investor dan publik.

1.4.2 Manfaat Teoritis/Akademis

Pada sisi akademik, untuk memperkaya literatur di bidang akuntansi keuangan dan pelaporan keberlanjutan dengan memberikan wawasan baru tentang faktor yang memengaruhi *sustainability report* di sektor pertambangan.

1. Menambahkan wawasan tentang hubungan antara kepemilikan institusional, kinerja lingkungan, dan *intellectual capital* terhadap pengungkapan *sustainability report*.
2. Penggunaan regresi data panel untuk memberikan analisis yang lebih mendalam dibandingkan penelitian sebelumnya yang mungkin hanya menggunakan data *cross-section* (satu tahun).
3. Memperkuat pemahaman tentang ESG dalam akuntansi, terutama dalam kaitannya dengan regulasi seperti POJK No. 51/2017 yang mewajibkan perusahaan menerbitkan *sustainability report*.

4. Tambahan referensi bagi penelitian selanjutnya, utamanya bagi mahasiswa atau akademisi yang ingin mengeksplorasi lebih lanjut faktor lain yang bisa memengaruhi *sustainability report*.